



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NEGARA
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 103/CMT.NGR/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021-2026

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu di susun Rencana Strategis Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana strategis dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang.....
↓

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri.....




8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA:.....


- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 - b. menyusun Rancangan Awal Renstra OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026;
 - c. menyusun Rancangan Renstra OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026;
 - d. menyusun Rancangan Akhir Renstra OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026;
 - e. memproses Penetapan Renstra OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Camat Negara Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 04 Pebruari 2021

BUPATI JEMBRANA,

PUTU ARTHA

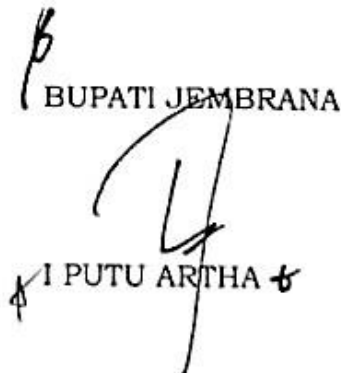
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana di Negara.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 103/CMT.NGR/2021
TENTANG
PEMNETUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGI KECAMATAN NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021-2026**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021-2026**

- Penanggung Jawab : Camat Negara
Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Negara
Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan
Keuangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
- Kelompok Kerja Tim
1. Pokja Pengumpulan & Pengolahan Data/Informasi
- Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
- Anggota
1. Lurah Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
 2. Lurah Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
 3. Lurah Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
 4. Lurah Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
2. Pokja Perumusan Renja
- Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
- Anggota
1. Kepala Seksi Sosial Budaya Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana


BUPATI JEMBRANA
I PUTU ARTHA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas karunia-Nya draft Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 dapat disusun. Renstra Pemerintah Kecamatan Negara ini bertujuan untuk memberikan arah dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026. Dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Negara tersebut diarahkan untuk pencapaian keberhasilan pembangunan dan pencapaian program pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Negara sehingga pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dapat terwujud.

Kami menyadari Renstra Kecamatan Negara ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan koreksi sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renstra ini dan keberlanjutan penyusunan di periode berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Renstra Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih.

Negara, 22 April 2021



Camat Negara,

Wayan Andy Suka Aniasmara.sstp.M.M
NIP. 197709261996011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN NEGARA	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya OPD Kecamatan Negara.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Negara	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Negara 50	
B A B III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD KECAMATAN NEGARA	52
3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan OPD Kecamatan Negara.....	52
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	56
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Jembrana	62
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Jembrana	63
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	66
B A B IV TUJUAN DAN SASARAN.....	68
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Negara	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	73
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	87
Bab VIII PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan.....	11
Tabel 2.2 Data Aparatur pada OPD Kecamatan Negara.....	28
Tabel 2.3 Data Tingkat Pendidikan Aparatur pada OPD Kecamatan Negara.....	28
Tabel 2.4 Data Aparatur OPD Kecamatan Negara Berdasarkan Golongan.....	29
Tabel 2.5 Rekapitulasi Barang ke Neraca Barang Milik Daerah Kabupaten Jembrana Pada OPD Kecamatan Negara per 31 Desember 2020	29
Tabel 2.6 Sarana Kerja OPD Kecamatan Negara.....	30
Tabel 2.7 Realisasi Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung OPD Kecamatan Negara Tahun 2021 - 2026.....	33
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Anggaran OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2021 -2026.....	34
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Periode Pelaksanaan Tahun 2021 – 2026	42
Tabel 3.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026.....	60
Tabel 3.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026	61
Tabel 3.3 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	66
Tabel 3.4 Rata-rata skor isu strategi.....	67
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kecamatan Negara	69
Tabel T-C.26	72
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	72
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana	74
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1 Peta Administratif Kecamatan Negara	9
Gambar 2.2 STRUKTUR ORGANISASI OPD KECAMATAN NEGARA	13
Gambar 3.1 Isu-Isu Strategis terkait telaahan RTRW dan KLHS	64



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Negara tahun 2021 – 2026 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis OPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan OPD yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2016 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Negara disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Negara tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen



RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

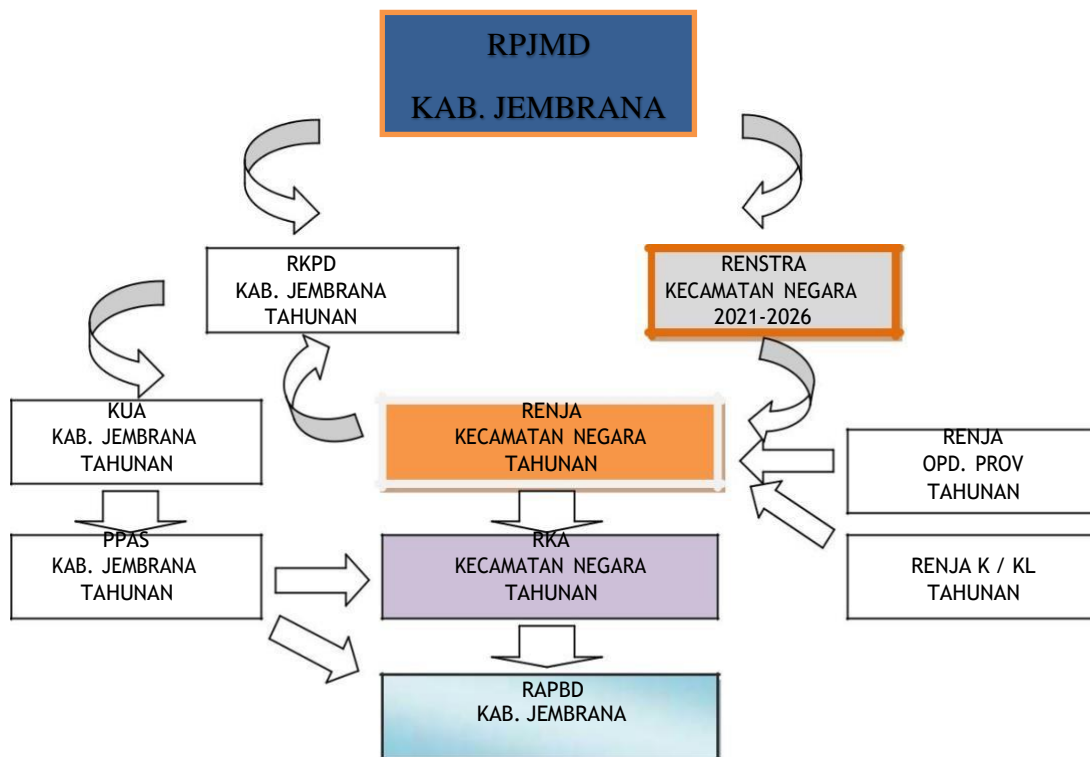
Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Negara dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Negara untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Negara merupakan salah satu OPD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, mempunyai kewajiban menyusun perencanaan kegiatan, baik perencanaan jangka menengah (rencana strategis) maupun perencanaan tahunan (rencana kegiatan dan anggaran).

Keberhasilan proses pembangunan perlu didukung terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penerapan dan pengembangan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, berkesinambungan, dan akuntabel.

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan, dengan demikian maka antara rencana satu sangat terkait dengan rencana lainnya dalam dokumen perencanaan. Renstra Kecamatan Negara 2021 – 2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Jembrana 2021-2026 dan RKPd Kabupaten Jembrana serta Renja OPD. Ilustrasi keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1.1

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2021-2026;
- 2) Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2021-2026;
- 3) Renstra merupakan dokumen perencanaan di tingkat OPD sebagai bahan masukan penyusunan RPJMD Kabupaten Jemberana Tahun 2021 – 2026, sebagai dasar dalam penyusunan RKPd Kabupaten Jemberana tiap tahunnya.
- 4) Dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Jemberana Tahun 2021-2026.



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana 2016 – 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;



12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
13. UU No 26 Tahun 2007;
14. UU No 11 Tahun 2020;
15. PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
16. Permendagri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
17. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Kep. Mendagri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Perda Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dgn Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Negara;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Negara dalam jangka menengah;



3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Negara yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel ;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum pemerintahan guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan Kecamatan Negara terutama pada penyusunan rencana kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Pemerintah Kecamatan Negara, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Pemerintah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
2. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Negara.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Negara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan di Kecamatan Negara.
4. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistematis di masa depan.
5. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan multi pihak dalam pelayanan di Kecamatan Negara.
6. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kecamatan Negara.
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Negara Kabupaten Jember 2021 - 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN NEGARA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Negara
- 2.2 Sumber Daya OPD Kecamatan Negara
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Negara
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Negara

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD KECAMATAN NEGARA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Negara
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Negara

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

OPD KECAMATAN NEGARA

Kecamatan Negara merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, memiliki luas wilayah 126,50 Km² atau sekitar 15% dari luas wilayah Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kecamatan Jembrana
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Melaya

Dari segi administratif, sebelum adanya pemekaran wilayah Kecamatan Negara Menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana, maka wilayah Kecamatan Negara terdiri atas 8 Kelurahan dan 14 Desa. Setelah pemekaran wilayah pada akhir tahun 2006, sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Jembrana, maka Kecamatan Negara terdiriatas 4 Kelurahan dan 8 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Banjar Tengah
2. Kelurahan Baler Bale Agung
3. Kelurahan Loloan Barat
4. Kelurahan Lelateng
5. Desa Banyubiru
6. Desa Pengambengan
7. Desa Cupel
8. Desa Tegalbadeng Barat
9. Desa Tegalbadeng Timur
10. Desa Baluk
11. Desa Berangbang
12. Desa Kaliakah

Dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2013 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana dapat diketahui bahwa Kecamatan Negara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan tingkat kepadatan yang cukup



2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Negara, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jembrana yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Negara dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Negara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan mengacu pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Camat selaku kepala OPD memiliki kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kecamatan Negara mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan kegiatan di bidang sosial dan kebudayaan;



- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / kelurahan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Kecamatan Negara mempunyai kewenangan seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN
PEMERINTAHAN UMUM	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk dan atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Tentang pengesahan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan berita acara panitia Pilkades dan Peraturan BPD;2. Untuk dan atas nama Bupati melantik Anggota BPD;3. Untuk dan atas nama Bupati melantik Kepala Desa;4. Untuk dan atas nama Bupati, menerima laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa/Kelurahan;5. Fasilitasi kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa/ Kelurahan.6. Pembinaan Penggunaan dana Bantuan dan Hibah.7. Pembinaan Terhadap Penyelenggara Pemerintahan desa.
TATA RUANG	<ol style="list-style-type: none">1. Memantau dan mengawasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah perkebunan terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul;2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;3. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomondasi IPR terhadap permohonan Pendirian



BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN
	bangunan sarana ibadah dan bangunan yang berdampak luas terhadap lingkungan. 2. Memfasilitasi sengketa tanah – tanah pemerintah di tingkat Desa Menginventarisir tanah sengketa milik pemerintah Daerah
KEPENDUDUKAN	1. Pelaksanaan Pelayanan KTP dan KK. 2. Penerbitan Kartu Penduduk Musiman / Kartu Identitas Non Permanen; 3. Laporan Data Kependudukan / melakukan pendataan penduduk dan pendatang; 4. Laporan Jumlah KTP dan KK yang diterbitkan; 5. Fasilitas penyuluhan administrasi kependudukan; 6. Fasilitas pelayanan operasi yustisi dan sipora.
PENCATATAN SIPIL	1. Pengesahan surat keterangan lahir, mati dan keterangan belum kawin; 2. Fasilitas penyuluhan administrasi catatan sipil.
PERINDUSTRIAN	1. Pendataan Industri di Wilayah Kecamatan; 2. Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha; 3. Rekomendasi Surat Ijin domisili usaha; 4. Rekomendasi Surat keterangan tempat industri; 5. Pengawasan tempat Industri; 6. Fasilitas pembinaan Industri.
PERDAGANGAN	1. Pendataan Perdagangan di Wilayah Kecamatan; 2. Rekomendasi Surat Ijin Tempat Perdagangan; 3. Rekomendasi Surat Ijin domisili usaha Perdagangan; 4. Rekomendasi Surat keterangan tempat Perdagangan; 5. Pengawasan Tempat Perdagangan; 6. Fasilitas Pembinaan Usaha Perdagangan. 7. Menerbitkan Ijin Usaha Mikro dan Kecil
KOPERASI	1. Pendataan koperasi di Wilayah Kecamatan; 2. Rekomendasi surat keterangan tempat Koperasi; 3. Pengawasan Tempat Koperasi; 4. Fasilitas Pembinaan Usaha Koperasi.
PARIWISATA	1. Pendataan Pariwisata di Wilayah Kecamatan; 2. Rekomendasi Surat Ijin Tempat Pariwisata; 3. Rekomendasi surat Ijin domisili usaha Pariwisata; 4. Rekomendasi surat keterangan tempat Pariwisata;
KESEJAHTERAAN SOSIAL	1. Untuk dan Atas Nama Bupati Menandatangani Surat Ijin pengumpulan Sumbangan Sosial/Pengumpulan uang dan barang di Kecamatan setempat; 2. Rekomendasi keluarga tidak mampu untuk kepentingan pendidikan, pelayanan kesehatan di rumah sakit; 3. Rekomendasi izin pendirian oprasional yayasan sosial, organisasi sosial dan panti asuhan; 4. Fasilitas kegiatan organisasi sosial/Kemasyarakatan dan LSM 5. Inventarisasi korban bencana

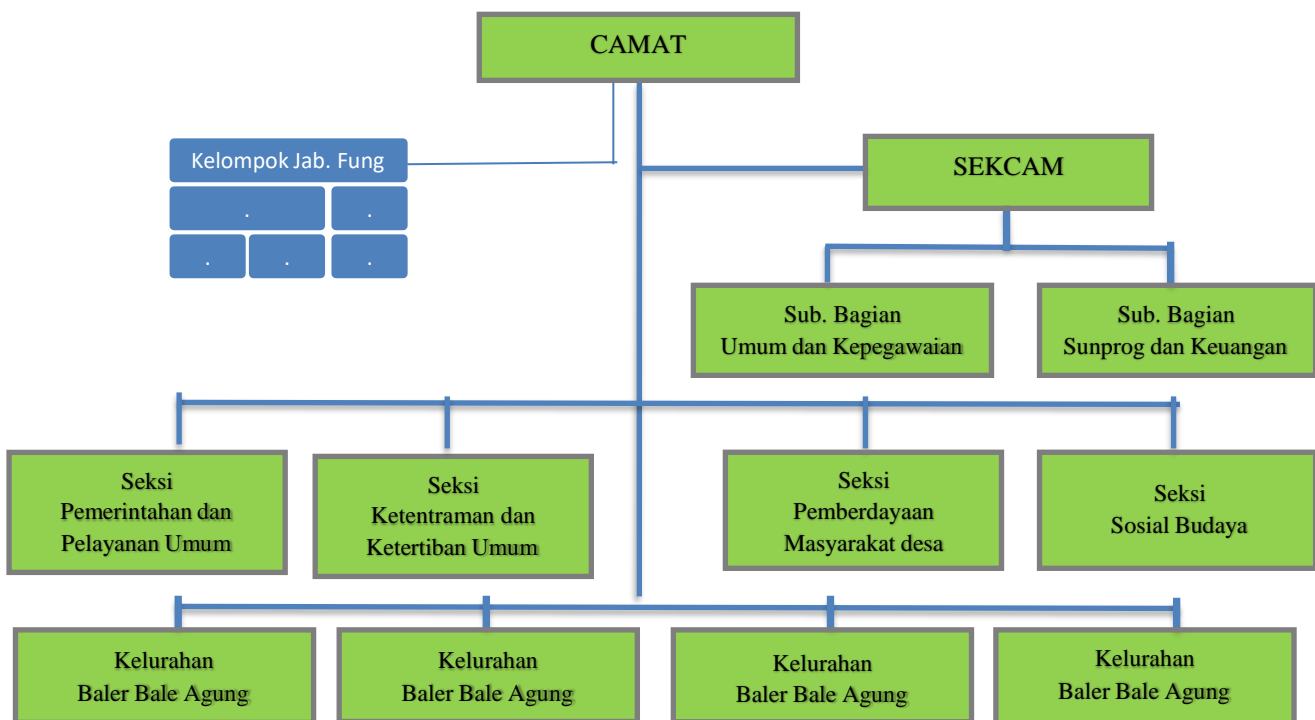


BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN
	6. Membantu menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam

Selain tugas tersebut, Camat juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kecamatan Negara terdiri atas 4 (empat) seksi yang langsung menangani pelayanan umum dan pembinaan masyarakat serta 1 (satu) sekretariat yang terbagi atas 2 (dua) Sub Bagian

Susunan Organisasi Kecamatan Negara yaitu :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan ;
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum ;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
6. Seksi Sosial Budaya ;
7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
8. Sub Bagian Sunprog dan Keuangan ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional ;



Gambar 2.2

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Negara



Rincian Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Camat Negara.

Camat mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam kutipan pasal 2 ayat (1) perbup 59 tahun 2016 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan perda, pemeliharaan prasarana dan sarana, kegiatan dibidang sosial dan kebudayaan, kegiatan pemerintahan yang dilakukan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi keewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang dipeintahkan oleh perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) dan rencana strategik kabupaten;
- b. Menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun aparat pemerintah daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja;



- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pelaksanaan tugas di kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
- g. Membian sekretaris dan kepala seksi serta lurah agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Meniali hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

SEKRETARIAT

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga kecamatan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembuianaan, mengoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Rincian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Memepelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan serta naskah kecamatan di bidang tugasnya;
- d. Mengoordinasikan kepala seksi dan lurah dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, investarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga kecamatan;
- f. Menyelenggarakan urusan perawatan perlengkapan dan peralatan kecamatan;



- g. Menerima naskah/surat-surat kecamatan yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke kepala sub bagian dan seksi;
- h. Menyiapkan data/arsip naskah kecamatan keluar/masuk;
- i. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan kecamatan;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP) kecamatan;
- k. Mempersiapkan bahan menyusun laporan sesuai bidang tugas;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.

Kepala sub bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Pembinaan, mengoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup sub bagian; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan lingkup sub bagian.

Rincian tugas kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah kecamatan serta penggunaan kantor;
- c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan kecamatan serta rumah kecamatan;
- d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran kecamatan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian kecamatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan kecamatan;
- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi kebutuhan pegawai, disiplin, penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pendidikan pelatihan, cuti, pensiun dan kesejahteraan kepegawaian;



- g. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan kecamatan;
- h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan kecamatan;
- i. Membuat laporan kepegawaian dan daftar urutan kepangkatan (DUK) serta sasaran kerja pegawai (SKP)
- j. Mengevaluasi hasil program kerja;
- k. Menyusun laporan hasil kegiatan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub bagian penyusunan program dan keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan keuangan.

Kepala sub bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. Perangkum program dan keuangan kegiatan kecamatan;
- c. Pembinaan, mengoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup sub bagian; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian

Rincian tugas kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian penyusunan program dan keuangan;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. Mengendalikan rencana tahunan;
- d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan pengganjian;
- e. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan kecamatan;
- h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;



- i. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP belanja barang dan jasa, dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran;
- j. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- k. Mendistribusikan uang persediaan (UP) kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- l. Melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- m. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- n. Mengumpulkan dan mengolah data laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- o. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi kecamatan;
- p. Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra), IKU, RKT, Renja dan penetapan kinerja;
- q. Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian rencana aksi penetapan kinerja kecamatan secara berkala;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA kecamatan;
- s. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LkjiP) kecamatan;
- t. Melaksanakan investarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- u. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- v. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan



SEKSI - SEKSI

5. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi pemerintahan dan pelayanan umum dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pelayanan umum, informasi, administrasi dan perizinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat.

Kepala seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pemerintahan dan pelayanan umum sesuai kebijakan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pengekoordinasian pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan terhadap pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menghimpun profil desa/kelurahan untuk pembuatan profil kecamatan;
- d. Memberikan pelayanan umum, informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat;
- e. Mengumpulkan, mengolah data dan menganalisa data di bidang pertahanan, sarana dan prasarana fisik pemerintahan desa/kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- g. Memverifikasi usulan calon perangkat desa dan calon kepala lingkungan yang diajukan oleh desa/kelurahan terkait persyaratan kelengkapan administrasi;
- h. Memfasilitasi penyusunan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan hari-hari besar dan bersejarah nasional di tingkat kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan dan bahan evaluasi hasil-hasil kegiatan kependudukan;



- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi pemerintahan dan pelayanan umum, serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- m. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Kepala seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum sesuai kebijakan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Pengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang sosial politik, ketenteraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketenteraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta linmas;



- d. Merencanakan dan melaksanakan program di bidang ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan program dan bahan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, dan organisasi sosial politik, LSM dan ormas;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya;
- h. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerja sama aparat pemerintah posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi ketentraman dan ketertiban umum, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebijakan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :



- a. Menyusun program kerja seksi pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan KK miskin, perencanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Merencanakan dan menyusun program pembinaan perekonomian, penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan kepada masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa/kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita, pemberdayaan perempuan, PKK, pasyandu dan keluarga berencana (KB);
- e. Mengevaluasi terhadap kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita, pemberdayaan perempuan, PKK, posyandu dan keluarga berencana (KB);
- f. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi pemberdayaan masyarakat desa, serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

8. Seksi Sosial dan Budaya

Seksi Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang sosial dan budaya. Adapun rincian tugas Kepala Seksi Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi sosial dan budaya berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang sosial dan budaya;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sosial dibidang lanjut usia, Balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan



sosial dan lingkungan kumuh;

- d. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan organisasi sosial lainnya;
- e. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila (gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial;
- f. Membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata;
- g. Melestarikan, membina, dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan agama;
- h. Mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang kesehatan dan pendidikan;



- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi sosial dan budaya, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

9. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam melaksanakan tugasnya, Camat memiliki wilayah kerja yang didalamnya terdiri dari Kelurahan. Adapun wilayah kerja Kecamatan Negara adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Baler Bale Agung
2. Kelurahan Banjar Tengah
3. Kelurahan Lelateng
4. Kelurahan Loloan Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan, maka Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat yaitu :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan



- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lurah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di tingkat kelurahan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kelurahan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kelurahan dilengkapi perangkat sebagai unsur pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Adapun susunan organisasi kelurahan terdiri dari :

1. Lurah;
2. Sekretaris Kelurahan;
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lurah

- a. merumuskan program kerja kelurahan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten, sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sekretaris kecamatan dan seksi-seksi di kecamatan;
- c. mengadakan rapat koordinasi tingkat kelurahan secara berkala;
- d. melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang ada di wilayah kelurahan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mencari alternatif pemecahannya;



- f. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Sekretaris Kelurahan

- a. menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya;
- c. menyelenggarakan administrasi kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kelurahan secara berkala;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Sekretariat Kelurahan serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



SEKSI-SEKSI

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

- a. menyusun program kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pelayanan umum;
- d. menyusun profil kelurahan;
- e. membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. membantu pelaksanaan administrasi Pemilihan Umum, Pilkada, Pilkaling;
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas administrasi di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pendataan penduduk, pengolahan data dan pelaporan mutasi penduduk;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang pendidikan dan perpustakaan kelurahan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi pemerintahan dan pelayanan umum serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. menyusun program kerja seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;



- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. mengkoordinasi tugas-tugas dibidang kesehatan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian untuk meningkatkan daya beli masyarakat;
- e. melaksanakan administrasi pelayanan kepada masyarakat terkait dengan sarana dan prasarana fisik/ non fisik;
- f. melakukan kegiatan meningkatkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- g. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi lembaga adat dan agama;
- i. membantu menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pembangunan dan memelihara sarana dan prasarana fisik kelurahan;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, kesehatan dan pembangunan;
- k. mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi lingkungan termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi pemberdayaan masyarakat serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

- a. menyusun program kerja seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. merencanakan dan melaksanakan program di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat kelurahan;
- c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta Linmas dilingkungan kelurahan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah di tingkat kelurahan;
- e. melaksanakan penertiban, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penduduk/penduduk pendatang dan rumah kos;
- f. melaksanakan pengawasan dan pelaporan lampu penerangan jalan umum (LPJU);
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Sumber Daya OPD Kecamatan Negara

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana memiliki pegawai sebanyak 43 orang PNS dan 23 orang Tenaga Kontrak. Dari jumlah pegawai tersebut, merupakan pegawai di Kecamatan 18 orang PNS dan 10 orang Tenaga Kontrak, di Kelurahan 21 orang PNS dan 13 orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 (dua) orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 9 (Sembilan) orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 4 (empat) Lurah, Eselon IVb



sebanyak 14 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Seklur/Kasi pada Kelurahan. Adapun Data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2, Tabel 2.3, Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.2
Data Aparatur pada OPD Kecamatan Negara

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	2	3	4	5
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat	3	5	8
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	-	1
4	Seksi Pemerintahan dan Yanum	1	1	2
5	Seksi Sosial Budaya	2	1	3
6	Seksi PMD	2	1	3
7	Lurah	4	-	4
8	Sekretariat Kelurahan	1	3	4
9	Seksi Kelurahan	5	12	17
10	Pegawai Kontrak	13	10	23
	Jumlah	33	33	66

Negara per Sumber data: Data kecamatan Januari 2021

Tabel 2.3
Data Tingkat Pendidikan Aparatur pada OPD Kecamatan Negara

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4
1	Pasca Sarjana/ S-2	2	3 %
2	Sarjana/ S-1	28	42 %
3	Sarjana Muda/ D-3	2	3 %
4	D-1/ D-2	0	0 %
5	SMA	33	50 %
6	SMP	1	2 %
7	SD	0	0 %
	Jumlah	66	100 %



Tabel 2.4
Data Aparatur OPD Kecamatan Negara Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	32
3	Golongan II	9
4	Golongan I	-
	JUMLAH	43

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kecamatan Negara merupakan salah satu perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugasnya selain dilimpahkan personil untuk mengisi unsur organisasinya, juga dilimpahkan peralatan dan perlengkapan kantor atau inventaris sebagai sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sampai dengan periode 31 Desember 2020, Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Kecamatan Negara berjumlah Rp **21.203.441.883,00** (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan bangunan, dan Aset tetap lainnya. Adapun secara rinci, nilai asset yang berada dalam penguasaan Kecamatan Negara dapat dilihat pada table 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Barang ke Neraca Barang Milik Daerah Kabupaten Jembrana Pada OPD Kecamatan Negara per 31 Desember 2020

No	Nama Barang	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Tanah	6.624.094.880
2	Peralatan dan Mesin	
	a. Alat Angkutan	842.888.500
	b. Komputer	483.177.740
	c. Alat Kantor dan rumah tangga	860.086.370
	d. Alat Studio dan komunikasi	39.303.000
3	Gedung dan bangunan	9.096.147.500
4	Jalan, Irigasi dan Instalasi	3.120.117.870
5	Aset Tetap Lainnya	81.596.000



6	Asset tak berwujud	5.000.000
7	Asset lain-lain	51.030.023
8	Asset Lancar	-
	TOTAL	21.203.441.883

Adapun daftar barang inventaris yang merupakan sarana kerja pada OPD Kecamatan Negara dapat dilihat pada table 2.6 berikut

Tabel 2.6
Sarana Kerja OPD Kecamatan Negara

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	1
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	37
3	Kendaraan Roda 3 (Tiga)	7
4	Kalkulator	4
5	Mesin Ketik Portable	3
6	Lemari Kayu	32
7	Rak Kayu	40
8	Filing Kabinet	22
9	Brankas	1
10	CCTV	1
11	Mesin Absen	1
12	LCD Proyektor	6
13	Layar Proyektor	3
14	Papan Visual/Papan Nama	11
15	Papan Nama Instansi	5
16	Papan Pengumuman	4
17	Meja Rapat	24
18	Tempat Tidur Kayu	2
19	Meja Reseption	6
20	Kursi Rapat	526
21	Kursi Tamu	4
22	Kursi Biasa	8
23	Bangku Tunggu	6
24	Meja Komputer	26
25	Sofa	10



No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah (Unit)
26	Jam Elektronik	6
27	Mesin Potong Rumput	8
28	Air Cleaner	1
29	Alat Pembersih Lainnya	2
30	AC Unit	36
31	Kipas Angin	22
32	Televisi	9
33	Amplifer	4
34	Loud Speaker	4
35	Sound System	7
36	Handycam	1
37	Wireless	5
38	Microphone	6
39	Stabilisator	5
40	Mimbar/Podium	1
41	Tangga Aluminium	2
42	Dispenser	4
43	Alat Pemadam/Portable	3
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12
46	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	81
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4
49	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	117
50	Pesawat Telepon	4
51	PC Unit/Komputer PC	32
52	Laptop	16
53	Printer	37
54	Scaner	2
55	Router	9



2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Negara

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Berdasarkan LKjIP Pemerintah Kecamatan Negara 2 (dua) tahun sebelumnya dapat digambarkan bahwa Tahun 2019, realisasi kegiatan pada Pemerintah Kecamatan Negara selama Tahun 2019 yaitu capaian realisasi keuangan sebesar 92,38% atau sebesar Rp. 12.732.344.242,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat puluh Dua Rupiah) yang terbagi dalam dua kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung mencapai 90,63%, dan belanja langsung mencapai 93,33%.

Sementara realisasi anggaran tahun 2020 pada Pemerintah Kecamatan Negara adalah sebesar 92,98% atau sebesar Rp.11.770.073.623,36 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Enam Rupiah) Yang terdiri dari 92,02% realisasi pada Belanja Tidak Langsung Rp. 5.333.405.827,44 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat Rupiah) dan 89,87% realisasi pada Belanja Langsung Rp. 6.435.667.795,92 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Dua) dapat dilihat pada table berikut



Tabel 2.7
Realisasi Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
OPD Kecamatan Negara Tahun 2016 - 2020

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)
2016	6	21	3.825.730.700,00	3.297.876.125,00
2017	13	40	10.728.305.406,00	8.617.358.483,00
2018	11	35	10.080.813.419,00	9.215.846.164,00
2019	11	42	13.783.042.343,00	12.732.344.242,00
2020	9	38	12.658.130.358,00	11.770.073.623,36



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Anggaran OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jember Tahun 2016 -2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase terlaksananya program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	99,61	99,01	81,52	0	-	99,61	99,01	81,52	0
2	Jumlah bibit tanaman hias dan pot bunga yang diserahkan kepada masyarakat		1 Tahun		-	100	-	-	-	-	99,97	-	-	-	-	99,97	-	-	-
3	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		1 Tahun		-	-	95	95	95	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
4	Jumlah terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan		1 Tahun		-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-
5	Terpenuhinya Pembinaan dan Evaluasi APBDes		1 Tahun		72,53	100	100	100	100	72,53	77,23	87,78	100	97,37	72,53	77,23	87,78	100	97,37



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Jumlah adat istiadat asliLoloan Barat yg dibina		1 Tahun		-	100	-	-	-	-	100				-	100	0	0	0
7	Terpenuhinya Desa Pakraman, banjar Pakraman dan Tempek yang diberdayakan		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	97,49	98,49	97,36	94,52	-	97,49	98,49	97,36	94,52
8	Terpenuhinya Pemberdayaan Desa Pakraman, Banjar Pakraman dan Tempek yang diberdayakan		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	99,83	92,06	99,19	99,75	-	99,83	92,06	99,19	99,75
9	Terpenuhinya Pemberdayaan Desa Pakraman, Banjar Pakraman dan Tempek Kelurahan Lelateng		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	99,3	96,24	93,13	69,94	-	99,3	96,24	93,13	69,94
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Loloan Barat		1 Tahun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Terpenuhinya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lelateng		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	89,83	88,22	96,17	1,22	-	89,83	88,22	96,17	1,22



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Terpenuhinya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Banjar Tengah		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	76,09	89,01	86,45	46,06	-	76,09	89,01	86,45	46,06
13	Terpenuhinya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Baler Bale Agung		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	76,07	89,81	86,7	29,87	-	76,07	89,81	86,7	29,87
14	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kelurahan Ioloan Barat		1 Tahun		-	-	-	100	100	-	-	-	97,29	0	-	-	-	97,29	0
15	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kelurahan Lelateng		1 Tahun		-	-	-	100	100	-	-	-	99,01	0	-	-	-	99,01	0
16	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Tengah		1 Tahun		-	-	-	100	100	-	-	-	72,57	0	-	-	-	72,57	0
17	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kelurahan Baler Bale Agung		1 Tahun		-	-	-	100	100	-	-	-	94,88	0	-	-	-	94,88	0
18	Terpenuhinya permohonan/pencari ijin serta		1		100	100	100	100	-	49,19	99,98	99,95	84,49	-	49,19	99,98	99,95	84,49	-



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Informasi pelayanan perijinan		Tahun																	
19	Prosentase Terpenuhiya Materai yang diadakan		1 Tahun		100	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Prosentase Terpenuhiya pembayaran sumber daya air dan Telepon		1 Tahun		95	100	90	100	90	84,34	99,26	100	50,84	66,66	84,34	99,26	100	50,84	66,66	
21	Prosentase terpenuhiya penyediaan Jasa Tenaga kontrak dan peralatan kebersihan Kantor		1 Tahun		100	100	90	100	90	98,34	99,17	99,14	99,99	100	98,34	99,17	99,14	99,99	100	
22	Terlaksananya pemeliharaan/perbaikiakan komputer		1 Tahun		100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
23	Prosentase terpenuhiya penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Tahun		100	100	90	90	90	100	98,93	100	100	100	100	98,93	100	100	100	
24	Prosentase terpenuhiya barang cetakan dan penggandaan		1 Tahun		100	100	90	90	90	78,74	100	100	100	99,93	78,74	100	100	100	99,93	
25	Prosentase Terpenuhiya		1		100	100	90	90	90	98,08	99,58	96,22	100	100	98,08	99,58	96,22	100	100	



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	penerangan gedung kantor		Tahun																	
26	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor		1 Tahun		-	-	90	90	90	-	-	98,59	100	100	-	-	98,59	100	100	
27	Prosentase Terpenuhi bahan bacaan		1 Tahun		100	100	90	100	90	100	73,52	100	91,43	91,43	100	73,52	100	91,43	91,43	
28	Prosentase Terpenuhi makanan dan minuman rapat		1 Tahun		90	90	90	90	90	91,44	93,43	96,22	100	86,17	91,44	93,43	96,22	100	86,17	
29	Prosentase Terpenuhi rapat - rapat dan konsultasi dengan Pemda dan Pemerintah Atasan		1 Tahun		90	90	90	90	90	99,36	91,74	99,99	99,9	99,52	99,36	91,74	99,99	99,9	99,52	
30	Prosentase Terpenuhi kegiatan Upacara/Upakara Keagamaan kantor Camat Negara,		1 Tahun		90	90	90	90	90	93,01	99,75	99,34	99,93	97,74	93,01	99,75	99,34	99,93	97,74	
31	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana mobil dinas operasional		1 Tahun		100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	Terlaksananya pembelian sarana dan prasarana Tangga, Komputer/PC, Printer, Stovol dan AC		1 Tahun		100	100	-	-	-	99,29	98,31	-	-	-	99,29	98,31	-	-	-
33	Prosentase Terpenuhi-nya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor Camat Negara		1 Tahun		100	100	100	100	100	90,54	98,31	99,79	100	100	90,54	98,31	99,79	100	100
34	Prosentase Terpenuhi-nya pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional.		1 Tahun		100	100	100	100	100	99,95	96,77	98,23	98,65	85,78	99,95	96,77	98,23	98,65	85,78
35	Prosentase Terpenuhi-nya Pemeliharaan/ Perbaikan Komputer		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	100	99,73	100	100	-	100	99,73	100	100
36	Prosentase Terpenuhi-nya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		1 Tahun		-	-	-	90	-	-	-	-	96	-	-	-	-	96	-
37	Prosentase Terpenuhi-nya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		1 Tahun		100	100	90	90	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-



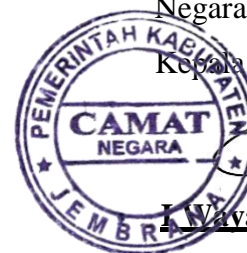
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38	Prosentase Terpenuhi-nya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam Penyusunan Pelaporan		1 Tahun		-	-	-	95	-	-	-	81,96	-	-	-	-	81,96	-	-
39	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		1 Tahun		-	-	-	95	-	-	-	82,67	-	-	-	-	82,67	-	-
40	Prosentase Terpenuhi-nya kegiatan lomba-lomba		1 Tahun		100	100	95	95	95	100	100	87,68	99,05	21,42	100	100	87,68	99,05	21,42
41	Prosentase terpenuhi-nya peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional		1 Tahun		100	100	95	95	95	100	100	100	100	37,73	100	100	100	100	37,73
42	Terlaksananya pembelian makanan dan minuman kegiatan, pembinaan pelestarian seni, Terlaksananya Jasa Sewa Pakaian Sekaa Gong		1 Tahun		100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43	Prosentase Operasional Kelurahan Loloan Barat yang terpenuhi		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	91,67	94,82	97,87	82,7	-	91,67	94,82	97,87	82,7
44	Prosentase Operasional Kelurahan Lelateng yang terpenuhi		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	95,4	90,17	94,41	93,11	-	95,4	90,17	94,41	93,11
45	Prosentase Operasional Kelurahan Baler Bale Agung yang terpenuhi		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	93,48	93,95	92,13	90,98	-	93,48	93,95	92,13	90,98
46	Prosentase Operasional Kelurahan Banjar Tengah yang terpenuhi		1 Tahun		-	100	100	100	100	-	93,87	97,39	91,47	94,54	-	93,87	97,39	91,47	94,54

Negara, 22 April 2021

Kepala OPD Kecamatan Negara



I. Nayan Andv Suka Aniasmara, SSTP, M.M

NIP. 19770926199601 1 001



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana
Periode Pelaksanaan Tahun 2016 – 2021

No	URAIAN (BELANJA)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	100	100	100	100	100	0%	0%
2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	-	20.685.000	16.160.000	22.800.000	16.800.000	-	20.531.426	13.416.600	22.800.000	11.199.311	-	99,26	83,02	50,84	66,66	-19%	-45%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	129.204.000	127.800.000	134.887.800	127.897.800	138.697.800	127.061.000	126.135.000	133.722.800	127.891.400	138.697.800	98,34	99,17	99,14	99,99	100	7%	9%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.919.400	26.430.000	26.509.800	25.246.000	28.056.000	21.919.400	26.146.800	26.509.800	25.246.000	28.056.000	100	98,93	100	100	100	28%	28%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.762.300	13.938.000	13.000.000	13.296.000	13.016.000	12.412.000	13.938.000	13.000.000	13.296.000	13.007.500	78,74	100	100	100	99,93	-17%	5%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.155.300	7.718.100	7.718.100	7.718.100	7.718.100	7.018.100	7.685.500	7.432.500	7.718.100	7.718.100	98,08	99,58	96,22	100	100	8%	10%



No	URAIAN (BELANJA)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	16	17	18	19
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	44.685.000	18.191.600	103.000.000	-	-	44.053.750	18.191.600	103.000.000	-	-	98,59	100	100	131%	134%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	3.840.000	4.200.000	4.200.000	5.400.000	3.970.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	100	73,52	100	91,43	91,43	-22%	-29%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.500.000	23.150.000	16.500.000	24.330.000	17.010.000	20.574.000	21.630.000	15.876.000	24.330.000	14.658.000	91,44	93,43	96,22	100	86,17	-24%	-29%
10	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	42.500.000	64.572.000	57.572.000	75.147.000	32.286.000	42.230.000	59.236.300	57.568.500	75.072.651	32.131.700	99,36	91,74	99,99	99,9	99,52	-24%	-24%
11	Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan	23.040.000	45.502.000	84.640.000	47.840.000	33.140.000	21.430.000	45.388.000	84.079.400	47.806.000	32.390.500	93,01	99,75	99,34	99,93	97,74	44%	51%
12	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	-	25.216.700	32.683.900	18.543.900	26.943.900	-	25.067.700	32.641.250	18.543.900	26.943.900	-	98,31	99,87	100	100	7%	7%



No	URAIAN (BELANJA)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	16	17	18	19
13	Pengadaan kendaraan dinas/Oparasional	28.750.000	-	-	-	-	28.750.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-100%
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	76.350.000	92.350.000	82.350.000	82.350.000	-	73.884.504	90.711.712	81.240.955	70.639.182	-	96,77	98,23	98,65	85,78	8%	-4%
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	59.000.000	-	-	-	19.856.900	58.000.000	-	-	-	99,29	98,31	-	-	-	-	-100%
16	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Gedung Kantor	-	5.600.000	6.600.000	6.600.000	11.197.000	-	5.500.000	6.586.000	6.600.000	11.197.000	-	98,31	99,79	100	100	100%	104%
18	Penyusun laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4.034.400	-	3.832.500	1.696.500	-	3.684.000	-	3.676.500	1.696.500	-	91,31	95,93	-	100	-58%	-54%
19	Penyusun Laporan Keuangan	-	10.343.800	-	9.598.000	4.486.000	-	10.175.200	-	8.639.400	4.486.000	-	98,37	-	90,01	100	-57%	-56%
20	Pembinaan Lomba-	-	-	-	-	17.612.000	9.500.000	13.175.000	15.443.000	-	3.772.000	100	100	87,68	99,05	21,42	85%	-60%



No	URAIAN (BELANJA)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	16	17	18	19
	Lomba	9.500.000	13.175.000	17.612.000	17.612.000					17.444.000								
21	Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional	132.680.000	251.750.000	187.400.000	204.582.000	16.060.000	132.680.000	251.750.000	187.400.000	204.582.000	6.060.000	100	100	100	100	37,73	-88%	-95%
22	Operasional Kelurahan Loloan Barat	-	319.836.000	315.036.000	299.284.200	325.283.400	-	293.185.701	298.723.022	292.895.865	269.015.075	-	91,67	94,82	97,87	82,70	2%	-8%
23	Operasional Kelurahan Lelateng	-	487.306.746	485.523.546	465.914.336	500.579.936	-	464.894.751	437.773.833	439.881.511	466.070.105	-	95,4	90,17	94,41	93,11	3%	0%
24	Operasional Kelurahan Baler Bale Agung	-	541.692.000	556.692.000	619.907.400	660.839.400	-	506.353.787	523.035.612	571.144.517	601.254.470	-	93,48	93,95	92,13	90,98	22%	19%
25	Operasional Kelurahan Banjar Tengah	-	316.737.800	324.737.800	314.038.410	332.571.210	-	297.323.433	316.248.620	287.238.614	314.396.573	-	93,87	97,39	91,47	94,54	5%	6%
26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	5.650.000	4.023.000	4.023.000	4.023.000	-	5.628.000	3.983.000	3.280.000	-	-	99,61	99,01	81,53	0	-29%	-100%
27	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	-	10.888.000	8.718.000	11.250.500	11.250.500	-	10.888.000	8.718.000	11.250.500	11.250.500	-	100	100	100	100	3%	3%



No	URAIAN (BELANJA)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	16	17	18	19
28	Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDesa	23.696.000	19.464.000	6.348.000	6.384.000	6.384.000	17.185.800	15.032.000	5.572.250	6.384.000	6.216.000	72,53	77,23	87,87	100	97,37	-73%	-64%
29	Pemberdayaan Lembaga Adat Kelurahan Baler Bale Agung	-	381.720.000	729.600.000	480.291.000	197.736.000	-	372.120.000	718.606.000	467.588.500	186.900.000	-	97,49	98,49	97,36	94,52	-48%	-50%
30	Pemberdayaan Lembaga Adat Kelurahan Banjar Tengah	-	281.823.000	581.800.000	370.162.500	120.162.500	-	281.333.000	535.619.300	367.168.500	119.862.500	-	99,83	92,06	99,19	99,75	-57%	-57%
31	Pemberdayaan Lembaga Adat Kelurahan Lelateng	-	294.407.000	563.400.000	565.675.000	315.675.000	-	292.347.750	542.236.900	526.817.000	516.860.400	-	99,3	96,24	93,13	69,94	7%	77%
32	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Loloan Barat	-	91.390.000	88.440.000	156.595.000	665.338.700	-	86.901.950	84.100.000	147.085.500	36.739.400	-	95,09	95,09	93,93	77,68	628%	-58%
33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-	92.981.800	191.840.000	295.569.500	441.345.500	-	83.527.175	169.248.700	284.246.800	5.400.000	-	89,83	88,22	96,17	1,22	375%	-94%



No	URAIAN (BELANJA)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	16	17	18	19
	Kelurahan Lelateng																	
34	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Banjar Tengah	-	49.550.000	47.580.000	90.635.000	414.438.000	-	37.701.800	42.350.800	78.356.750	199.163.700	-	76,09	89,01	86,45	46,06	736%	428%
35	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Baler Bale Agung	-	66.870.000	361.620.000	495.149.056	714.422.000	-	50.870.000	324.771.400	429.317.556	213.392.000	-	76,07	89,81	86,7	29,87	968%	319%
36	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loloan Barat	-	-	-	906.962.556	497.000.000	-	-	-	882.387.450	-	-	-	-	97,29	0	-45%	-100%
37	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baler Bale Agung	-	-	-	989.002.000	465.071.000	-	-	-	938.354.552	-	-	-	-	94,88	0	-53%	-100%



No	URAIAN (BELANJA)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	16	17	18	19
38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Tengah	-	-	-	844.813.556	459.633.375	-	-	-	613.052.823	-	-	-	-	72,57	0	-46%	-100%
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lelateng	-	-	-	1.074.859.056	464.011.673	-	-	-	1.064.181.500	-	-	-	-	99,01	0	-57%	-100%
40	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	8.750.000	-	-	-	-	8.400.000	-	-	-	-	96	-	-100%	-100%
41	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	31.600.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	31.600.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	100	100	100	100	-	100%	-100%
42	Kegiatan Masal Kemasyarakatan	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	198.741.337	-	-	-	-	99,37	-	100%	-100%
43	Peningkatan Pelayanan Perijinan	20.035.000	14.145.000	12.810.000	7.755.000	-	10.179.400	14.142.200	12.803.560	6.552.000	-	49,19	99,98	99,95	84,49	-	100%	-100%
44	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan	-	504.700.000	-	-	-	-	487.915.000	-	-	-	-	96,67	-	-	-	100%	-100%



*Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Negara Kab. Jembrana
Tahun 2021-2026*

No	URAIAN (BELANJA)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	16	17	18	19
	Persampahan																	
45	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH	-	495.300.000	-	-	-	-	495.170.000	-	-	-	-	99,97	-	-	-	100%	-100%
46	Pelestarian Seni	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100%	-100%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Negara

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, organisasi dihadapkan pada tantangan dan hambatan pengembangan pelayanan OPD. Meskipun demikian, OPD juga memiliki kekuatan dan peluang guna mengembangkan pelayanan OPD. Hal ini karena perkembangan kinerja pelayanan OPD sebagai suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan organisasi, sementara faktor eksternal terdiri dari tantangan dan peluang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan pelayanan OPD, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yaitu :

2.4.1 Threat (T) / Tantangan

- 1. Adanya POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang berpenghasilan rendah.** Di Kecamatan Negara tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.125 KK yang perlu mendapatkan bantuan dan bergulir agar dapat mandiri dan dapat menciptakan pekerjaan baru, dan bukan konsumtif tetapi produktif.
- 2. Adanya Pengaruh Sosial Politik dan Ekonomi.** Kondisi Sosial Politik yang tidak menentu akan sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat dan jika tidak diintensifkan secara cermat melalui pembinaan politik karena akan dapat menghambat pembangunan.
- 3. Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah.** Kemajuan IPTEK tanpa didukung dengan SDM yang mempunyai kemampuan/wawasan dan keterampilan yang memadai melalui pendidikan formal dan non formal serta kursus-kursus, pelatihan keterampilan lainnya.
- 4. Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat** Terdapat gangguan Kamtibmas seperti pelanggaran judi, dan kriminalitas lainnya

2.4.2 Oportunity (O) / Peluang.

- 1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 2. Adanya Koordinasi antar Instansi Kecamatan.**



Keberhasilan pembangunan suatu wilayah Kecamatan tidak terlepas adanya koordinasi antar instansi vertikal maupun horisontal terpadu dan juga peran serta masyarakat.

3. Adanya Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah di bidang fasilitas maupun dana perlu adanya keserasian dan keterpaduan program yang merupakan aspirasi dari bawah. Jadi Musrenbang Tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk memberikan segala prioritas program yang telah diusulkan untuk ditetapkan menjadi program yang mendesak dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Adanya Lembaga-lembaga Perkreditan Desa.

LPD maupun Lembaga-Lembaga Koperasi lainnya sangat membantu permodalan bagi masyarakat dan mengembangkan usaha sesuai bidang dan prestasinya baik sebagai petani, pedagang, buruh dll.

5. Adanya Subak.

Organisasi Subak sangat membantu kesejahteraan anggota maupun meningkatkan produksi pendapatan dan kesejahteraannya karena segala teknologi modern intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dapat diserap lewat subak.



B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD KECAMATAN NEGARA

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan OPD Kecamatan Negara

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Negara, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Negara yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

- a) Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal.
- b) Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan ;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
- d) Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif.
- e) Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke OPD.
- f) Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/ kuat.
- g) Secara umum, pendekatan analisis isu strategis di lingkungan Pemerintah Kecamatan Negara menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats (SWOT)*.

Sementara variabel-variabel statis dan dinamis yang dijadikan pertimbangan antara lain meliputi aspek administratif, finansial, teknologi, lingkungan, politik dan sosial.



3.1.1 Administratif

Faktor-faktor dukungan administratif antara lain meliputi kemampuan organisasi dalam upaya melaksanakan kebijakan, seperti dukungan sumber daya aparatur kecamatan Negara yang sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Keberadaan aparatur di Kecamatan Negara merupakan sumberdaya yang menjadi kekuatan untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Negara. Aparat yang dimiliki Kecamatan Negara secara kuantitas telah memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik, sehingga hal ini menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik. Aparat sering dianggap pegawai yang identik dengan urusan administratif, sehingga terkesan tidak menjadi prioritas organisasi.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan di Kecamatan Negara, aparat pelaksana diharapkan menguasai dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Akuntabilitas dan manajemen keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan kapasitas organisasi yang kaitannya terhadap pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Akuntabilitas merupakan unsur penting dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governmen

3.1.2 Finansial

Faktor finansial merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap pencapaian visi dan misi kecamatan Negara. Dengan adanya Revisi struktur OPD tahun 2016, maka anggaran kecamatan mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya pemindahan pengelolaan pendanaan operasional kelurahan, honor bendesa, honor kelian, posyandu, lembaga pemberdayaan, dll, untuk dikelola oleh pihak kecamatan.

Keberadaan kecamatan sebagai perangkat daerah yang mengelola anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaporan menjadikan kecamatan Negara sebagai perangkat daerah yang bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Adanya penambahan anggaran harus diimbangi dengan keinginan serta kesadaran aparat untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sehingga kelemahan yang ada dapat segera diperbaiki



3.1.3 Teknologi

Teknologi mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Kecamatan Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Teknologi yang berkembang seiring dengan mudahnya akses informasi membuat semua pihak untuk dapat menyesuaikan dan mengembangkan diri terhadap kemajuan alat dan sistem yang mendukung teknologi informasi

Aparat kecamatan Negara tentunya perlu terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan terhadap kemajuan teknologi. Kesenjangan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki aparat terhadap cara penggunaan teknologi informasi merupakan kelemahan yang harus segera diminimalisir guna menciptakan pelayanan publik yang bisa didukung oleh kemajuan teknologi informasi.

3.1.4 Lingkungan

Seiring pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Jembrana, ditambah laju perpindahan penduduk dari luar Kabupaten Jembrana memberikan pengaruh terhadap lingkungan Kabupaten Jembrana. Pembangunan Kabupaten Jembrana yang semakin meningkat secara drastis, memerlukan antisipasi yang tepat agar tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan hidup. Ruang terbuka hijau yang terus terdesak oleh pembangunan menghasilkan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Setiap tahun Kecamatan Negara mengalami banjir, tanah longsor dan abrasi seiring dengan datangnya musim penghujan. Terjadinya banjir dan tanah longsor merupakan permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan banjir, tanah longsor dan abrasi dapat diminimalisir dengan upaya yang dilakukan oleh semua pihak.

Sampah sebagai penyebab banjir menimbulkan permasalahan baru tentang penanggulangan dan lahan yang harus disiapkan untuk mengolahnya. Sampah yang dihasilkan Kabupaten Jembrana, saat ini masih tergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memerlukan lahan luas untuk menimbun dan mengolah.

Sampah yang dapat menjadi masalah bila tidak tertangani dengan bijak, sebenarnya memiliki nilai ekonomis jika dilakukan pengolahan dan pemilahan. Sampah rumah tangga yang telah dipilah antara sampah organik dan non-organik memudahkan pengolahan untuk



mengubah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Kecamatan Negara memiliki kesempatan untuk bisa mengajak masyarakat melakukan pemilahan sampah melalui program yang direncanakan berkaitan dengan isu lingkungan hidup.

3.1.5 Politik

Dukungan dari berbagai tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Negara perlu kiranya menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi kebijakan dalam upaya mencapai visi dan misi Kecamatan Negara 2021-2026.

Masyarakat sebagai konsumen memiliki harapan terhadap kinerja kecamatan untuk bisa mewujudkan pelayanan publik yang baik sehingga dapat mendukung terwujudnya pembangunan daerah. Dinamika yang terjadi di masyarakat berimplikasi terhadap pelaksanaan Program Kecamatan Negara. Peranan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat dapat membawa masyarakat kearah yang ingin dituju yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

3.1.6 Sosial

Faktor sosial, budaya dan agama merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan dalam upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kecamatan Negara.

Kecamatan Negara sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana memiliki wilayah dan penduduk yang beragam sebagaimana karakteristik perkotaan. Keberagaman masyarakat perkotaan secara umum berpotensi menimbulkan permasalahan yang beragam. Hal ini perlu dicermati aparat Kecamatan Negara agar mampu merangkul semua pihak untuk bisa terus bersinergi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Negara. Budaya yang beragam antar individu masyarakat, memberikan perbedaan pula dalam melakukan pendekatan kepada mereka, mulai dari pengelolaan sampah sampai konflik antar masyarakat.

Kegiatan musyawarah yang merupakan salah satu contoh upaya bersama semua pihak untuk dapat menyelesaikan masalah. Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan musyawarah dalam menentukan perencanaan dan penyelesaian permasalahan ialah adanya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kesepakatan yang telah dicapai. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam mendukung



pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Negara sehingga tujuannya dapat tercapai.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Jembrana adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berdasarkan Tri Hita Karana”

Penjelasan Visi:

Kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Menjadikan masyarakat Jembrana yang bahagia akan memberikan berbagai dampak positif dalam segala aspek kehidupan dan akan mengarahkan pada hidup yang lebih baik, seperti memberikan kesempatan bagi masyarakat Jembrana untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan sesama, dengan lingkungan dan dengan Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan produktivitas yang lebih besar, memiliki umur yang lebih panjang, kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang lebih tinggi, dan kemampuan pemecahan masalah membuat keputusan mengenai rencana hidup dengan lebih baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pengukuran tingkat kebahagiaan melalui Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK). BPS telah melakukan dua kali SPTK yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2017. Hasil dari SPTK itu adalah angka Indeks Kebahagiaan Indonesia.

Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 menurut BPS sebesar 70,69 sedangkan Indeks Kebahagiaan Bali 2017 sebesar 72,48. Dengan angka ini, bisa berkesimpulan bahwa penduduk Indonesia dan Bali lumayan bahagia.

Bagaimana dengan kebahagiaan Jembrana? Belum pernah dilakukan pengukuran, oleh karena itu, misi dan program diarahkan kepada pencapaian Indeks Kebahagiaan Jembrana dia atas rata-rata Kebahagiaan Bali yaitu diatas 72,48.

Untuk mewujudkan Visi ***“Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berdasarkan Tri Hita Karana”*** ditetapkanlah Misi ***“Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana”***

Penjelasan dari Misi sebagai berikut :

Sekilas mirip dengan visi pemerintah Provinsi Bali yaitu NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI, beda pada kata SAT dengan Sad, namun sejalan dengan Misi Gubernur Bali yaitu Misi Nomor 11, Mengembangkan tata



kehidupan Krama Bali secara skala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kerthi yaitu Atma Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi, dan Jaghat Kerthi. Bagaimanapun Kabupaten Jembrana merupakan bagian integral dari Pemerintah Provinsi Balidan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga misi dan program tentu saja harus sejalan dengan Misi Pemerintahan Provinsi Bali dsn Misi Pemerintah Pusat.

Membangun 6 sumber kehidupan (Sad Kerthi) untuk kebahagiaan masyarakat Jembrana

1. Membangun Ketakwaan kepada Tuhan (Atma Kerthi)

- a. Penguatan keyakinan kepada Tuhan melalui ibadah agama
- b. Penguatan kelembagaan umat dalam upaya menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian
- c. Penataan obyek wisata religi yang terintegrasi
- d. Pelestarian dan pengembangan adat, bahasa bali, seni budaya dan tradisional dan modern
- e. Meningkatkan kesejahteraan pemuka dan pelayan keagamaan serta perangkat desa dan adat
- f. Penyelenggaraan kemah keagamaan dan seni budaya di kalangan generasi muda untuk toleransi dan pembanguan karakter
- g. Pemberian penghargaan perjalanan suci bagi masyarakat berprestasi dalam bidang agama, seni budaya dan adat (Tirta Yatra, Umroh, Ziarah) serta penghargaan khusus untuk olahragawan berprestasi nasional dan internasional
- h. Legalisasi lembaga-lembaga keagamaan dan seni budaya
- i. Ngaben Masal setiap 2,5 tahun, serta diseluruh desa sebagai obyek wisata terintegrasi
- j. Mambangun Museum Banten dan Lontar terbesar di Indonesia sebagai pelestarian budaya asli Bali.

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (Jana Kerthi)

- a. Penyediaan layanan bimbingan Pra Nikah, Ibu Hamil, dan Balita Sehat
- b. Pemberian uang saku anak sekolah (SD, SMP, SLTA dan sederajat) dari keluarga miskin
- c. Pemberian beasiswa berprestasi ke program S1, S2, S3, dalam negeri maupun luar negeri dan dukungan sumberdaya untuk pendirian perguruan tinggi baru



- d. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN melalui manajemen ASN yang modern
 - e. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pegawai kontrak (guru, tenaga medis, administratif dan teknis) setara UMK (Upah Minimum Kabupaten)
 - f. Penyediaan Diklat Keterampilan Usaha untuk Wanita dan Penyediaan Ujian Sertifikasi Kompetensi dan Profesi untuk SDM berdaya saing
 - g. Bantuan makanan gratis setiap hari jumat bagi jompo miskin dan bantuan khusus untuk lansia
 - h. JKJ Plus (pelayanan kesehatan tingkat I gratis dalam bentuk dokter/bidan keluarga dan layanan door to door oleh perawat
 - i. JKJ Seab Mobil mempercepat pemeriksaan covid-19 hanya dalam 1 jam dan fasilitas lab standar rumah sakit rujukan.
- 3. Menjaga Kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung (Wana Kerthi**
- a. Pelestarian tradisi yadnya wana kerthi dan wana laba
 - b. Penghijauan hutan gunung dengan menanam beringin, kepuh, bunut, buah-buahan, camplung, bambu dan pohon langka antuk bangunan suci berbasis masyarakat
 - c. Pelestarian dan pemanfaatan hutan buyuk di muara, pengembak dan sempadan pantai
 - d. Perhutanan Keluarga untuk kelestarian adat dan budaya
 - e. Pelestarian dan pengembangan hutan penyangga pura (Taman Gumi Banten)
 - f. Pelestarian hutan bakau dan Budidaya serta industrialisasi Blue Carbon
 - g. Penguatan lembaga subak dan subak abian untuk pelestarian hutan
 - h. Pengembangan obyek wisata adventure yang terintegrasi
 - i. Pembebasan pajak untuk pemilik lahan jalur hijau
 - j. Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk destinasi wisata terintegrasi
- 4. Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan (Danu Kerti)**
- a. Pelestarian tradisi yadnya danu kerthi
 - b. Peningkatan layanan air minum sehat
 - c. Pelestarian sumber sumber air melalui kelompok-kelompok peduli air



- d. Pompanisasi dan pipanisasi untuk ketersediaan air bagi pertanian dan rumah tangga
 - e. Revitalisasi sungai ijo gading untuk peningkatan nilai ekonomi dan wisata (Pasar Terapung)
 - f. Pembangunan ekosistem, pusat riset dan sistem informasi potensi pertanian
 - g. Pembangunan call center untuk pengaduan petani
 - h. Pengembangan ragam komoditas pertanian yang berorientasi pada lokal dan kebutuhan pasar
 - i. Pembebasan pajak lahan pertanian produktif
 - j. Kemitraan Tripartit Pertanian Berbasis Subak
- 5. Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (Segara Kerthi)**
- a. Pelestarian tradisi yadnya segara kerthi dan petik laut (festival)
 - b. Pembersihan laut dan pesisir pantai dari sampah plastik
 - c. Pemberian legalitas kapal nelayan dibawah 7GT
 - d. Pembangunan ekosistem, pusat riset dan sistem informasi potensi perikanan
 - e. Pengembangan ragam komoditas perikanan yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar
 - f. Pengembangan infrastruktur dan transportasi laut untuk jalur Denpasar-Jemberana-Banyuwangi
 - g. Pengembangan pusat kuliner dan produk olahan perikanan
 - h. Legalisasi tempat melasti dan pura segara
 - i. Rehabilitasi pantai berbasis pemberdayaan masyarakat (crowdfunding)
 - j. Revitalisasi pelabuhan dan Industri Perikanan Terpadu
- 6. Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)**
- a. Pelestarian tradisi yadnya jagat kerthi
 - b. Pengembangan dan penataan sirkuit untuk otomotif, pacuan kuda, makepung, balap jukung, balap merpati dan lomba layangan
 - c. Pelestarian dan pengembangan jegog, gong, angklung, bumbang, kendang berbasis sekeha sebanan
 - d. Mengoptimalkan fasilitas publik (kebun raya Jagadnatha, rest area, anjungan cerdas, sold sotrage, pabrik es, pabrik sampah, perusda, TPA, Bus Sekolah dan J-Net)



- e. Pengelolaan sampah terpadu di tiap desa/kelurahan dan pusat-pusat perekonomian (Gerakan Jembrana Olah Sampah Mandiri)
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (smart city)
- g. Peningkatan kerjasama antar wilayah dan lembaga (sister city)
- h. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan pemangkasan pelayanan perijinan dengan standar ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2013 serta jaminan hubungan bepartit yang harmonis
- i. Membangun Desa mandiri, berbudaya hidup sehat, disiplin dan peduli lingkungan berbasis keluarga
- j. Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pendampingan hukum bagi pelayan masyarakat dan pembentukan Desa Sadar Hukum.

Berdasarkan pada Visi Bupati Jembrana Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Tujuan. Berikut diuraikan keterkaitan antara Misi dengan Tujuan Prioritas pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan Prioritas
1	2	3
1	Membangun ketakwaan kepada Tuhan (Atma Kerthi)	Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya
2	Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (Jana Kerthi)	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3	Menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung (Wana Kerthi)	Meningkatnya kualitas lingkungan
4	Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan (Danu Kerthi)	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan sumber sumber air
5	Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (Segara Kerthi)	Terwujudnya ragam komoditas perikanan yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar
6	Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)	1. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap 2. Terwujudnya masyarakat Jembrana bahagia 3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi



No	Misi	Tujuan Prioritas
1	2	3
		4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)

Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran. Berikut diuraikan keterkaitan antara Tujuan Prioritas dan sasaran strategis seperti pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026

No	Tujuan Prioritas	No	Sasaran Strategi
1	2	3	4
1	Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1	Meningkatnya toleransi hidup beragama
		2	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	3	Meningkatnya kualitas pendidikan
		4	Meningkatnya kualitas kesehatan
		5	Meningkatnya daya saing masyarakat
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan
		7	Meningkatnya kawasan hutan yang lestari untuk mendukung pariwisata agro berbasis masyarakat
4	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan sumber sumber air	8	Meningkatnya kualitas air bersih dan sehat
		9	Meningkatnya pemanfaatan sumber sumber air untuk mendukung pariwisata budaya berkelanjutan
		10	Meningkatkan kualitas hasil pertanian
		11	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal
5	Terwujudnya ragam komoditas perikanan yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar	12	Meningkatnya ekonomi sektor perikanan
6	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	13	Meningkatnya kesadaran berdemokrasi
		14	Menurunnya potensi konflik
		15	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan
		16	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan



No	Tujuan Prioritas	No	Sasaran Strategi
1	2	3	4
			bencana
		17	Menurunnya tingkat resiko bencana
	Terwujudnya masyarakat Jembrana bahagia	18	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		19	Meningkatnya Kesetaraan Gender
		20	Terpenuhinya hak hak anak
		21	Terwujudnya masyarakat desa mandiri bahagia
		22	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	23	Meningkatnya investasi daerah
		24	Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat
		25	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)	26	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah
		27	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		28	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
		29	Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Jembrana

Analisis RPJMD Kabupaten dan Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Negara terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Pemerintah Kecamatan Negara telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kabupaten Jembrana dan Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Pemerintah Kecamatan Negara melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kabupaten Jembrana atau Renstra K/L



Hasil review terhadap Renstra k/L dan Renstra Provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD yang akan ditangani para renstra OPD kabupaten periode berikutnya.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Jembrana

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah sebagai pusat pengembangan wilayah Bali Barat sekaligus penyangga pelestarian lingkungan alam Bali yang hijau, lestari, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis keterpaduan kegiatan pertanian, perindustrian, sumber daya pesisir dan kelautan yang terintegrasi dengan pariwisata menuju pemerataan pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan Tri Hita Karana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan ruang Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dasar yang bisa mendukung perekonomian masyarakat dengan semangat mewujudkan Jembrana yang *Jagadhita*.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana 2012-2032 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan jangka menengah atau rencana strategis OPD yang ada di Kabupaten Jembrana. RTRW Kabupaten Jembrana memiliki kebijakan struktur ruang kota meliputi : pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Melihat kebijakan struktur ruang kota tersebut, maka Kecamatan Negara yang menjadi salah satu OPD di Kabupaten Jembrana akan menyelaraskan pelayanan dengan kebijakan yang telah diatur dalam RTRW dengan pertimbangan faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.

Kecamatan Negara melaksanakan pelayanan berpedoman pada kebijakan pola ruang yang tercantum pada RTRW Kabupaten Jembrana meliputi :

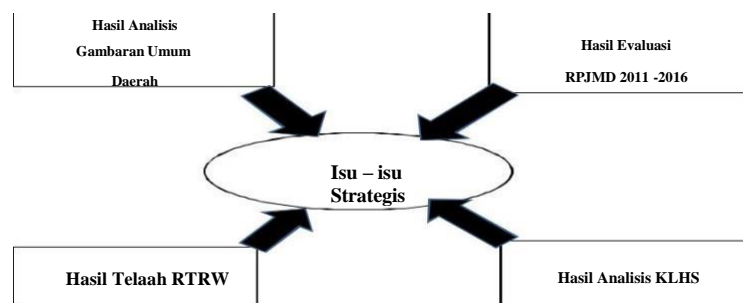
- a. peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat;
- b. pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali;



Rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi ekologi dan kegiatan publik masih menjadi salah satu permasalahan Kabupaten Jember. Permasalahan yang ada ini masih berkaitan erat dengan urusan lingkungan hidup yaitu masalah sampah. Kompleksitas masalah sampah terkait dengan manajemen, infrastruktur, TPA, serta tidak meratanya informasi mengenai pengolahan sampah yang lebih modern dan efisien.

Permasalahan pembangunan terkait urusan lingkungan hidup di Kabupaten Jember harus segera diatasi. Keberagaman permasalahan pembangunan terkait lingkungan hidup terdiri dari : konversi lahan, struktur ruang yang tidak berimbang antara pusat kota dengan wilayah lainnya, pemukiman baru yang terus meningkat, sumber air bersih, pencemaran sungai, potensi banjir, bencana tanah longsor, kesadaran masyarakat dan RTH.

Hasil analisis terhadap isu-isu strategis untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah; diawali dengan menelaah kondisi umum daerah, baik struktur ruang, pola ruang, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat dilihat pada gambar 3 berikut :



Gambar 3.1

Isu-Isu Strategis terkait telaahan RTRW dan KLHS

Pola ruang Kecamatan Negara dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik Zona Lindung dan Zona Budidaya.

A. Zona Lindung berupa kawasan inti dari kawasan lindung dengan arahan pemanfaatan untuk mempertahankan kawasan-kawasan yang belum terintervensi oleh kegiatan manusia, mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah dibudidayakan, pembatasan secara ketat terhadap kegiatan budidaya pada kawasan lindung, konservasi kawasan lindung yang mengalami degradasi, penghutanan kembali kawasan lindung yang beralih



fungsi, relokasi di kawasan rawan bencana, pemantapan kawasan suci dan kesucian pura.

Zona Lindung di Kecamatan Negara terdiri atas :

1. Kawasan Hutan Lindung

Luas kawasan hutan di Kecamatan Negara mencapai 1.850 Ha atau sekitar 14,62 % dari luas wilayah Kecamatan Negara. Kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan lindung, yang termasuk Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19). Kawasan hutan lindung di Kecamatan Negara merupakan 5,6 % dari keseluruhan luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Jembrana. Desa penyanding hutan di Kecamatan Negara adalah Desa Berangbang (1.250 Ha) dan Kelurahan Baler Bale Agung (600 Ha).

2. Kawasan Perlindungan Setempat

- a. Kawasan Sempadan Pantai, yang terletak di sepanjang garis pantai Kecamatan Negara.
- b. Kawasan Hutan Bakau/Mangrove, di Desa Cupel.
- c. Kawasan Sempadan Sungai, yang terletak di sepanjang aliran sungai (DAS) di Kecamatan Negara.
- d. Kawasan Sekitar Mata Air atau Waduk, yang salah satunya terletak di Bendungan Benel, Desa Kaliakah.
- e. Kawasan Sempadan Jurang, yang terletak di kawasan lereng di Kecamatan Negara.
- f. Kawasan Radius Kesucian Pura, di daerah sekitar Pura.
- g. Kawasan Suci, di kawasan Pura

B. Zona Budidaya

Berupa kawasan dengan fungsi pariwisata, pertanian lahan basah dan lahan kering, permukiman, perdagangan, perindustrian dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya lainnya dengan arahan pada pemanfaatan dengan dukungan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan keberadaan zona penyangga sebagai batas kegiatan dan memberikan dukungan kepada kelestarian zona lindung sebagai bagian dari sumber daya alam sebagai daya dukung terhadap zona budidaya.

Zona budidaya di Kecamatan Negara terdiri atas :

1. Kawasan Pertanian, tersebar di Kecamatan Negara.
2. Kawasan Pariwisata, yang berupa wisata pantai, wisata pegunungan dan wisata budaya (mekepong).



3. Kawasan Pemukiman
4. Kawasan Industri, di Desa Pengembangan.
5. Kawasan Pertambangan
6. Kawasan Perdagangan dan Jasa
7. Kawasan Pusat Pemerintahan dan Core Budaya, di Kota Negara.
8. Kawasan Olahraga, tersebar di Kecamatan Negara
9. Kawasan Strategis Ekonomi, bertempat di Desa Pengembangan yang merupakan pelabuhan perikanan dan industri.

Perwujudan Pola Ruang di Kecamatan Negara secara garis besar diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup, adat istiadat maupun agama, mengingat adanya kecenderungan pergeseran pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan budidaya, maka diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung, sedangkan pada kawasan budidaya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan salah satu aspek yang penting guna mengantisipasi perkembangan lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan Negara baik dari segi aspek lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Merujuk pada identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Negara sebagaimana telah dibahas diatas, maka teridentifikasi beberapa urutan prioritas isu yang perlu untuk segera diatasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel –tabel berikut

Tabel 3.3
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	2	3
1	Memiliki pengaruh besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD dan RPJMD Kabupaten Jembrana	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit (pengaruh) untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100



Nilai Skala Kriteria

No	Isu strategis	1 2 3 4 5 6 Dst ..							Total skor
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Administratif	20	10	20	-	-	25	-	75
2	Finansial	20	-	-	10	-	25	-	55
3	Politik	-	-	20	-	-	25	-	45
4	Teknologi	20	-	20	-	-	25	-	65
5	Lingkungan	-	-	20	10	-	25	-	55
6	Sosial	-	-	20	-	15	-	-	35

Rata-rata skor/ bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Rata-rata skor isu strategi

No	Isu-isu strategis	Total Skor	Rata-rata skor
1	2	3	4
1	Administratif	75	18,75
2	Finansial	55	18,33
3	Politik	45	22,50
4	Teknologi	65	21,67
5	Lingkungan	55	18,33
6	Sosial	35	17,50



B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Negara

4.2.1 Tujuan Kecamatan Negara

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Negara merupakan penjabaran dari implementasi misi yang telah ditetapkan. Tujuan ini merupakan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan tujuan ini didasarkan pada faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Negara. Adapun tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Negara adalah :

1. Terwujudnya kerukunan hidup beragamaserta penguatan kehidupan adat dan budaya
2. Terwujudnya ketentraman, keteriban umum dan stabilitas politik yang mantap.

4.2.2 Sasaran Kecamatan Negara

Sasaran, merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur atau sesuatu yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Negara sesuai dengan interval waktu pencapai yang telah disepakati. Sasaran, menggambarkan pula fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
2. Meningkatnya kesadaran berdemokrasi
3. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Penjabaran tujuan dan sasaran Kecamatan Negara dapat dilihat pada Tabel T-C.25 berikut :



Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kecamatan Negara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	1. Meningkatnya ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Berstatus Mandiri	12,50 %	25,00 %	37,50 %	37,50 %	50,00 %
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik di kecamatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,14%	3,26%	3,47%	3,89%	3,95%
		2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai LKjIP	78	79,45	80,55	82,65	85,87



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana diketahui bahwa arus globalisasi telah membawa Revisi, baik dalam aspek teknologi, sosial, politik, finansial maupun aspek administratif yang pada akhirnya bermuara pada dinamika isu-isu lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan Negara. Guna mengatasi berbagai isu dan permasalahan tersebut, pemilihan strategi dan kebijakan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan Kecamatan Negara mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterjemahkan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2021-2026.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2021-2026, maka ditempuh melalui strategi kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan. Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2021-2026 adalah :

4.3.1. Kebijakan

- Konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Konsistensi penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

4.3.2. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3.3. Kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kuangan SKPD
7. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD



8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemberdayaan
10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
22. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Desung Kantor atau Bangunan Lainnya
25. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa
26. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
27. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
28. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
29. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
30. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
31. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
32. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan



33. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
34. Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
35. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
36. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

T-C.26

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Misi 6 : Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (jagat kerthi)

Tujuan PD	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program	Kegiatan
Tujuan 1 meningkatkan ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum indikator : persentase penegakan perda	Meningkatnya ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum indikator : persentase penegakan perda	Meningkatnya upaya preventif, preventif, dan refresif atas pelanggaran perda dan perbup	peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Tujuan 2 meningkatkan kemandirian masyarakat di kecamatan indikator : persentase desa dengan indeks desa membangun (IDM) Berstatus mandiri	meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal daerah indikator : persentase desa dengan indeks desa membangun (IDM) Berstatus mandiri	meningkatkan koordinasi dan kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 2. Kegiatan pemberdayaan kelurahan
		Melaksanakan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa



Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Negara Kab. Jember
Tahun 2021-2026

<p>Tujuan 3 meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah</p>	<p>Meningkatkan keterbukaan informasi publik di kecamatan</p>	<p>Pelaksanaan optimalisasi pelayanan yang tepat, mudah, transparan, akuntabel</p>	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p>	<p>1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</p>
<p>Tujuan 4 meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel Indikator : Nilai LKJIP</p>	<p>Meningkatnya tata penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang akuntabel</p>	<p>1. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja OPD/Nilai LKJIP</p> <p>2. Meningkatkan kesesuaian dan relevansi dokumen perencanaan kecamatan dengan dokumen perencanaan kabupa</p> <p>3. Memantapkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah</p> <p>4. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur</p>	<p>1. Meningkatkan tertib dan kualitas dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan</p> <p>2. Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana aparatur</p> <p>3. Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>4. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan</p> <p>5. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset pemerintah di kecamatan dan kelurahan</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	<p>1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (arah kebijakan 1)</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah (arah kebijakan 1)</p> <p>3. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (arah kebijakan 2)</p> <p>4. Administrasi umum perangkat daerah (arah kebijakan 3)</p> <p>5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (arah kebijakan 4)</p>



*Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Negara Kab. Jembrana
Tahun 2021-2026*

					6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (arah kebijakan 5)
--	--	--	--	--	---



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program OPD Kecamatan Negara merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Negara. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka waktu menengah untuk keuntungan tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan kecamatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Negara selama lima tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Negara. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Negara akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Jembrana selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Pagu		
									Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum				Persentase Peningkatan Ketertiban Umum																	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	
	Meningkatnya ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum			Persentase Penegakan Perda	%	N/A	100	N/A	95		95										Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	%	N/A	N/A	N/A	100	2.816.100	95	19.301.100	95	1.435.100	95	4.123.052	95	4.535.357	95	4.535.357	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	



		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	N/A	N/A	N/A	95	2.816.100	95	19.301.100	95	1.435.100	95	4.123.052	95	4.535.357	95	4.535.357	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	N/A	N/A	12	2.816.100	12	19.301.100	95	1.435.100	95	4.123.052	95	4.535.357	95	4.535.357	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jember, Negara, Semua Kelurahan
Meningkatkan kemandirian masyarakat di kecamatan				Persentase Desa Maju Mandiri																	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	
Meningkatnya kemandirian masyarakat di kecamatan				Persentase Desa dengan IDM Berstatus Mandiri	%	N/A	16,67	N/A	33,33		33,33										Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan	%	N/A	N/A	N/A	100	6.401.362.900	95	3.231.385.600	95	2.620.754.937	95	3.748.475.000	95	3.748.475.000	100	3.748.475.000	Perangkat Daerah yang Menangani	



																					Kecamatan Negara	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	12	300.487.400	12	62.424.400	95	36.446.000	95	337.111.800	95	339.111.800	95	339.111.800	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	1	7.875.400	1	7.825.400	95	3.840.000	95	7.875.800	95	7.875.800	95	7.875.800	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	N/A	N/A	5	292.612.000	5	54.599.000	95	32.606.000	95	331.236.000	95	331.236.000	95	331.236.000	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Adat/Kemasyarakatan (Desa/Br.Pakra man, Tempek, LPM, PKK, Lingk/RT/Br.Dinas) yang di Berdayakan dan Honor Kaling/Kelompok yang Dibayarkan	Bulan	N/A	N/A	N/A	12	6.100.875.500	12	3.168.961.200	95	2.584.308.937	95	3.406.050.000	95	3.455.427.300	95	3.455.427.300	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	



		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	N/A	N/A	N/A	7	2.695.621.000	7	1.396.437.000	95	1.047.643.387	95	1.516.388.300	95	1.516.388.300	95	1.516.388.300	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	N/A	N/A	N/A	4	3.405.254.500	4	1.772.524.200	95	1.536.665.550	95	1.889.661	95	1.917.056.000	95	1.917.056.000	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	N/A	N/A	N/A	100	4.468.800	95	4.468.800	95	2.279.300	95	4.513.100	95	4.578.600	95	4.578.600	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Tersusun di Kecamatan Negara	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	12	4.468.800	12	4.468.800	95	2.279.300	95	4.513.100	95	4.578.600	95	4.578.600	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	8	4.468.800	8	4.468.800	95	2.279.300	95	4.513.100	95	4.578.600	95	4.578.600	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan



																					Negara	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	N/A	N/A	N/A	7	191.410.000	7	118.082.600	95	229.005.000	95	257.095.200	95	260.822.400	95	260.822.400	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel				Nilai SAKIP Perangkat Daerah																	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	



	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	100		79,15										Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKjIP	%	N/A	N/A	N/A	100	7.224.535.937	79,15	7.817.877.957		10.275.421.210		12.287.177.498		12.506.664.260			Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah di Kecamatan Negara	Dokumen	N/A	N/A	N/A	17	1.526.500	17	813.400	79,15	7.421.937.873	80,15	8.274.250.498	79,15	8.435.561.760	79,15	8.435.561.760	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	5	848.000	5	365.400	5	523.450	5	1.026.500	5	1.026.500	5	1.026.500	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	N/A	N/A	N/A	12	678.500	-	-	100	418.250	100	820.000	100	820.000	100	820.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi	Kab. Jemberana, Negara, Semua



				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																Kecamatan Negara	Kelurahan	
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	N/A	N/A	-	-	1	448.000	17	509.900	17	1.000.000	17	1.000.000	17	1.000.000	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	N/A	N/A	N/A	12	5.903.621.287	12	6.295.705.857	12	6.179.737.273	12	6.485.534.498	12	6.619.845.760	12	6.619.845.760	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	N/A	N/A	N/A	47	5.898.965.287	47	6.295.073.657	47	6.176.230.623	47	6.452.450.498	47	6.613.761.760	47	6.613.761.760	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	170.000	-	-	100	825.000	100	825.000	100	825.000	100	825.000	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan



	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	2.486.000	6	632.200	100	1.165.650	100	2.286.000	100	2.286.000	100	2.286.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	N/A	N/A	1	2.000.000	-	-	100	651.700	100	1.278.000	100	1.278.000	100	1.278.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	%	N/A	N/A	N/A	100	28.000.000			100	11.450.000	100	75.700.000	100	75.700.000	100	75.700.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	N/A	N/A	N/A	28	28.000.000	-	-	100	11.450.000	100	74.200.000	100	74.200.000	100	74.200.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana di Kecamatan Negara	%	N/A	N/A	N/A		627.441.800	100	720.962.700	100	430.858.500	100	855.393.000	100	855.393.000	100	855.393.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	



		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	10	75.065.300	28	16.320.000	100	23.464.500	100	13.605.700	100	13.605.700	100	13.605.700	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	7	82.200.000	2	21.800.000	100	50.500.000	100	89.000.000	100	89.000.000	100	89.000.000	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	5	450.000	-	-									Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	39	280.748.800	35	310.927.200	100	234.383.600	100	352.069.300	100	352.069.300	100	352.069.300	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	2	35.669.300	8	46.079.500	100	19.638.400	100	50.570.000	100	50.570.000	100	50.570.000	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan



		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	12.960.000	12	14.040.000	100	3.492.000	100	13.800.000	100	13.800.000	100	13.800.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	N/A	N/A	1	140.348.400	92	311.796.000	100	94.580.000	100	331.548.000	100	331.548.000	100	331.548.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Negara	%	N/A	N/A	N/A	100	482.650.000	100	548.048.400	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	N/A	N/A	100	10.060.000	100	6.560.000	100	4.860.000	100	9.550.000	100	9.550.000	100	9.550.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	N/A	12	123.450.000	12	177.168.400	100	182.998.800	100	182.998.800	100	182.998.800	100	182.998.800	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan



		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	N/A	23	349.140.000	24	364.320.000	100	379.500.000	100	379.500.000	100	379.500.000	100	379.500.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan di Kecamatan Negara	%	N/A	N/A	N/A	100	181.296.350	100	252.347.600	100	154.871.600	100	229.473.200	100	229.473.200	100	229.473.200	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	N/A	N/A	23	107.710.750	34	177.944.500	34	118.138.500	100	149.776.000	100	149.776.000	100	149.776.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A	N/A	26	37.932.500	60	30.850.000	31	13.900.000	100	34.350.000	100	34.350.000	100	34.350.000	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	N/A	72	26.053.100	25	28.053.100	100	13.383.100	100	26.897.200	100	26.897.200	100	26.897.200	Perangkat Daerah yang Mengurangi Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan



*Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Negara Kab. Jemberana
Tahun 2021-2026*

		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	N/A	8	9.600.000	30	15.500.000	100	9.450.000	100	18.450.000	100	18.450.000	100	18.450.000	Perangkat Daerah yang Menangani Kecamatan Negara	Kab. Jemberana, Negara, Semua Kelurahan
--	--	-----------------	--	--	------	-----	-----	-----	---	-----------	----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	--	---



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi Perencanaan dan Realisasi yang tersusun di Kecamatan Negara	4 Dokumen	4 Dokumen	746.350	4 Dokumen	820.985	4 Dokumen	903.084	4 Dokumen	993.392	4 Dokumen	1.092.731	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	1 Tahun	1 Tahun	6.493.983.416	1 Tahun	7.143.381.757	1 Tahun	7.857.719.933	1 Tahun	8.643.491.926	1 Tahun	9.507.841.119	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	6.488.861.816	1 Tahun	7.137.747.997	1 Tahun	7.851.522.797	1 Tahun	8.636.675.077	1 Tahun	9.500.342.584	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen LKJIP Perangkat daerah yang tersusun di Kecamatan Negara (dokumrn)	1 Dokumen	1 Dokumen	187.000	1 Dokumen	205.700	1 Dokumen	226.270	1 Dokumen	248.897	1 Dokumen	273.787	Kantor Camat Negara



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen LRA, BKU, Buku Pajak, SPJ Fungsional, Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang tersusun di Kecamatan Negara	6 Laporan	6 Laporan	2.734.600	6 Laporan	3.008.060	6 Laporan	3.308.866	6 Laporan	3.639.753	6 Laporan	4.003.728	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK OPD yang tersusun di Kecamatan Negara	5 laporan	5 laporan	2.200.000	5 laporan	2.420.000	5 laporan	2.662.000	5 laporan	2.928.200	5 laporan	3.221.020	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemberdayaan	Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	589.925.710	100	648.918.281	100	713.810.109	100	785.191.120	100	863.710.232	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia di Kecamatan Negara		15 Jenis	82.572.930	15 Jenis	90.830.223	15 Jenis	99.913.245	15 Jenis	109.904.570	15 Jenis	120.895.027	Kantor Camat Negara



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan dapur pada kantor lurah baler bale agung		1 Jenis	583.000	1 Jenis	641.300	1 Jenis	705.430	1 Jenis	775.973	1 Jenis	853.570	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksana upacara dan upacara yang diikuti dan dilaksanakan (jenis) Jumlah upacara dan banten yang di adakan (Tahun) Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (tahun) Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (tahun)		6 jenis 1 tahun 1 tahun 1 tahun	298.811.590	6 jenis 1 tahun 1 tahun 1 tahun	328.692.749	6 jenis 1 tahun 1 tahun 1 tahun	361.562.024	6 jenis 1 tahun 1 tahun 1 tahun	397.718.226	6 jenis 1 tahun 1 tahun 1 tahun	437.490.049	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan di Kecamatan Negara (jenis)		2 jenis	39.066.830	2 jenis	42.973.513	2 jenis	47.270.864	2 jenis	51.997.951	2 jenis	57.197.746	Kantor Camat Negara



*Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Negara Kab. Jembrana
Tahun 2021-2026*

		7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang tersedia di Kecamatan Negara (bulan)	12 bulan	14.256.000	12 bulan	15.681.600	12 bulan	17.249.760	12 bulan	18.974.736	12 bulan	20.872.210	Kantor Camat Negara
--	--	---	---	---	------	---	--	--	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	---------------------



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di laksanakan (tahun)		1 tahun	154.635.360	1 tahun	170.098.896	1 tahun	187.108.786	1 tahun	205.819.664	1 tahun	226.401.631	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jasa penunjang urusan pemerinthan daerah yang tersedia		100		100	#VALUE!	100	#VALUE!	100	#VALUE!	100	#VALUE!	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (lembar)		1611 lembar	8.421.600	1611 lembar	9.263.760	1611 lembar	10.190.136	1611 lembar	11.209.150	1611 lembar	12.330.065	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang di bayar (bulan)		12 bulan	127.875.000	12 bulan	140.662.500	12 bulan	154.728.750	12 bulan	170.201.625	12 bulan	187.221.788	Kantor Camat Negara



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak untuk mendukung efektifitas kegiatan pemerintahan yang di adakan (tahun)		1 tahun	386.339.580	1 tahun	424.973.538	1 tahun	467.470.892	1 tahun	514.217.981	1 tahun	565.639.779	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan nBarang Milik Daerah yang dilaksanakan		100	197.795.015	100	217.574.517	100	239.331.968	100	263.265.165	100	289.591.681	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa service, sukubcadang, pembayaran pajak kendaraan, biaya STNK, BBM kendaraan dinas yang di sediakan (tahun)		1 tahun	121.350.625	1 tahun	133.485.688	1 tahun	146.834.256	1 tahun	161.517.682	1 tahun	177.669.450	Kantor Camat Negara



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang di pelihara untuk menunjang kegiatan kantor yang di adakan (tahun)		1 tahun	40.614.750	1 tahun	44.676.225	1 tahun	49.143.848	1 tahun	54.058.232	1 tahun	59.464.055	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang di adakan (jenis)		11 jenis	25.269.640	11 jenis	27.796.604	11 jenis	30.576.264	11 jenis	33.633.891	11 jenis	36.997.280	Kantor Camat Negara
		7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah peralatan gedung yang diperbaiki dan dipelihara di Kecamatan Negara (unit)		18 unit	10.560.000	18 unit	11.616.000	18 unit	12.777.600	18 unit	14.055.360	18 unit	15.460.896	Kantor Camat Negara
Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95	95	7.142.649.250	95	7.856.914.175	95	8.642.605.593	95	9.506.866.152	95	10.457.552.767	Kantor Camat Negara



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	3	2.01	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	1 kegiatan	1 kegiatan	330.536.140	1 kegiatan	363.589.754	1 kegiatan	399.948.729	1 kegiatan	439.943.602	1 kegiatan	483.937.963	Kantor Camat Negara
		7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan di Kecamatan Negare (kegiatan)	1 kegiatan	1 kegiatan	8.662.940	1 kegiatan	9.529.234	1 kegiatan	10.482.157	1 kegiatan	11.530.373	1 kegiatan	12.683.410	Kantor Camat Negara
		7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan lomba yang dilaksanakan (kegiatan)	3 kegiatan	3 kegiatan	321.873.200	3 kegiatan	354.060.520	3 kegiatan	389.466.572	3 kegiatan	428.413.229	3 kegiatan	471.254.552	Kantor Camat Negara
		7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	6.839.613.110	4 kelurahan	7.523.574.421	4 kelurahan	8.275.931.863	4 kelurahan	9.103.525.049	4 kelurahan	10.013.877.554	Kantor Camat Negara



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang di laksanakan (kelurahan)	4 kelurahan	4 kelurahan	3.080.501.600	4 kelurahan	3.388.551.760	4 kelurahan	3.727.406.936	4 kelurahan	4.100.147.630	4 kelurahan	4.510.162.393	Kantor Camat Negara
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah desa pakraman, banjar pakraman dan tempek yang di berdayakan kelurahan se-kecamatan Negara (kelurahan)	4 kelurahan	4 kelurahan	3.759.111.510	4 kelurahan	4.135.022.661	4 kelurahan	4.548.524.927	4 kelurahan	5.003.377.420	4 kelurahan	5.503.715.162	Kantor Camat Negara
Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95	95	3.097.710	95	3.407.481	95	3.748.229	95	4.123.052	95	4.535.357	Kantor Camat Negara
		7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	38 kali	38 kali	3.097.710	38 kali	3.407.481	38 kali	3.748.229	38 kali	4.123.052	38 kali	4.535.357	Kantor Camat Negara



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan yang di laksanakan di kecamatan Negara (kali)	38 kali	38 kali	3.097.710	38 kali	3.407.481	38 kali	3.748.229	38 kali	4.123.052	38 kali	4.535.357	Kantor Camat Negara
Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang diadakan	100	100	222.871.000	100	245.158.100	100	269.673.910	100	296.641.301	100	326.305.431	Kantor Camat Negara
		7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	222.871.000	3 kegiatan	245.158.100	3 kegiatan	269.673.910	3 kegiatan	296.641.301	3 kegiatan	326.305.431	Kantor Camat Negara



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan harnas yang di laksanakan di kecamatan Negara (kegiatan)	3 kegiatan	3 kegiatan	222.871.000	3 kegiatan	245.158.100	3 kegiatan	269.673.910	3 kegiatan	296.641.301	3 kegiatan	326.305.431	Kantor Camat Negara
Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang undangan	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAAN DESA	Terlaksananya Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 tahun	1 tahun	4.915.680	1 tahun	5.407.248	1 tahun	5.947.973	1 tahun	6.542.770	1 tahun	7.197.047	Kantor Camat Negara



Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKP D Penanggung Jawab		
										2022		2023		2024		2025			2026	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7	1	6	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	1 tahun	1 tahun	4.915.680	1 tahun	5.407.248	1 tahun	5.947.973	1 tahun	6.542.770	1 tahun	7.197.047	Kantor Camat Negara
		7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APBDes yang tersusun di kecamatan Negara (tahun)	1 tahun	1 tahun	4.915.680	1 tahun	5.407.248	1 tahun	5.947.973	1 tahun	6.542.770	1 tahun	7.197.047	Kantor Camat Negara

Negara, 06 April 2021

Camat Negara.

I Wayan Andy Suka Anjasmara, S.STP., M.M.

NIP.19770926 199601 1 1001



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dari beberapa indikator kinerja utama Pemerintah Kecamatan Negara dapat dilihat indikator-indikator yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jemberana Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	
2	Prosentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		95%	95%	95%	95%	95%	
3	Prosentase Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		95%	95%	95%	95%	95%	
4	Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang diadakan		95%	95%	95%	95%	95%	
5	Prosentase Terlaksananya Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		95%	95%	95%	95%	95%	



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Negara Tahun 2021 - 2026 disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Negara selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana. Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberi arah program pembangunan Kecamatan Negara selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Dalam perencanaan, Renstra digunakan sebagai landasan penyusunan RKT dan RKA Pemerintah Kecamatan Negara. Renstra juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja di Sekretariat dan Seksi-Seksi serta bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pemerintah Kecamatan Negara. Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 juga merupakan acuan bagi seluruh unit terkait yang ada di lingkungan Kecamatan Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 2021-2026. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Negara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Negara, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Negara.
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah



Kecamatan Negara untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana.

4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Jembrana, keberadaan Renja Pemerintah Kecamatan Negara harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Negara.
5. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Pemerintah Kecamatan Negara dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan penyesuaian.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-OPD Pemerintah Kecamatan Negara Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja-OPD Pemerintah Kecamatan Negara harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.